

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian dalam perjalanan terjadi perubahan dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi tiap daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam atau sumber penerimaan dan mengeksplorasinya menyambut dengan penuh harapan, sedangkan bagi daerah yang miskin sumber penerimaan menanggapi dengan sedikit rasa

pesimis. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Sehingga mendorong serta menjadikan Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Kemudian terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui secara independen bagaimana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah maka dilakukan audit oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada akhirnya akan memberikan suatu opini atas LKPD berdasarkan bukti-bukti, Laporan Keuangan, dan temuan-temuan yang ada.

Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan pemerintah daerah yang berada diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satunya dengan menganalisis laporan keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Untuk mendapat gambaran perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam periode pelaporan tiga tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 dapat diamati dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1

**Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang dan
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun Anggaran 2012 – 2014**

Tahun	Uraian	Kabupaten Kupang		Kab. TTS	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2012	Pendapatan Daerah	643.745.706.721,00	679.669.480.719,69	724.199.264.738,00	717.883.024.039,94
	Bela nja Daerah	769.983.638.509,00	691.319.530.872,10	819.531.496.883,14	690.963.794.243,94
	Surplus/Defisit	(126.236.931.788,00)	(11.650.050.152,41)	(95.332.232.145,14)	26.919.229.796,00
	Pembiayaan	126.236.931.788,00	104.035.063.788,21	95.332.232.145,14	96.701.956.337,14
	SILPA	-	92.385.013.635,80	-	123.621.186.133,14
2013	Pendapatan Daerah	757.726.868.872,00	750.107.692.084,60	849.000.594.596,00	838.702.123.645,50
	Belanja Daerah	858.749.778.269,00	756.888.587.797,00	985.271.780.729,14	825.665.890.451,00
	Surplus/Defisit	(99.902.909.397,00)	(6.780.895.712,40)	(136.271.186.133,14)	13.036.233.194,50
	Pembiayaan	99.902.909.397,00	142.275.182.776,80	136.271.186.133,14	136.810.909.433,14
	SILPA	-	135.494.287.064,40	-	149.847.142.627,64
2014	Pendapatan Daerah	876.132.767.836,00	836.362.953.414,59	922.942.515.762,00	920.739.659.117,10
	Belanja Daerah	960.455.369.721,00	792.819.508.940,00	1.071.625.158.389,64	826.584.424.153,00
	Surplus/Defisit	(84.322.601.885,00)	43.543.444.474,59	(148.682.642.627,64)	94.155.234.964,10
	Pembiayaan	84.322.601.885,00	135.021.270.568,41	148.682.642.627,64	150.075.837.627,64
	SILPA	-	173.769.362.618,37	-	244.231.072.591,74

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2012-2014

Tabel 1.1 di atas menunjukkan perbandingan realisasi anggaran Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2012-2014. Dapat dilihat dengan jelas bahwa sepanjang tahun 2012-2014 Kabupaten Kupang mengalami defisit anggaran selama dua tahun yaitu tahun

2012 dan 2013 yang dikarenakan realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Sedangkan Kabupaten Timor Tengah Selatan sepanjang tahun 2012-2014 mengalami defisit anggaran yang dikarenakan realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan.

Tabel 1.2

Perbandingan Neraca Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 – 2014

Tahun	Uraian	Kabupaten Kupang	Kabupaten TTS
2012	Aset	1.585.348.644.033,20	1.317.769.490.891,69
	Kewajiban	8.636.149.967,00	18.172.912.947,40
	Ekuitas Dana	1.576.712.494.066,20	1.299.596.577.944,29
2013	Aset	1.768.471.501.080,69	1.466.492.708.080,17
	Kewajiban	3.701.107.391,00	3.414.083.651,00
	Ekuitas Dana	1.764.770.393.689,69	1.463.078.624.429,17
2014	Aset	1.934.065.333.337,67	1.680.761.079.945,09
	Kewajiban	4.445.314.131,00	4.840.520.427,00
	Ekuitas Dana	1.929.610.019.206,67	1.675.920.559.518,09

Sumber : Neraca Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2012-2014

Tabel 1.2 di atas menunjukkan perbandingan neraca Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2012-2014. Dapat dilihat dengan jelas bahwa sepanjang tahun 2012-2014 aset dan ekuitas dana baik Kabupaten kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan. Sedangkan pada kewajiban baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi.

Tabel 1.3

**Perbandingan Laporan Arus Kas Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun Anggaran 2012 – 2014**

Tahun	Uraian	Kabupaten Kupang	Kabupaten TTS
2012	Aktivitas Operasi	110.815.238.606,00	132.247.523.215,00
	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(123.691.565.386,51)	(105.328.293.419,00)
	Aktivitas Pembiayaan	(1.393.321.048,00)	(10.329.122.150,00)
	Aktivitas Non Anggaran	367.660.672,00	12.476.834.151,00
2013	Aktivitas Operasi	112.687.291.764,60	168.670.253.617,50
	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(120.296.377.363,00)	(155.634.020.423,00)
	Aktivitas Pembiayaan	51.495.128.913,37	13.241.327.700,00
	Aktivitas Non Anggaran	(4.959.064.187,00)	(9.776.320.953,00)
2014	Aktivitas Operasi	166.529.147.538,59	226.659.013.574,10
	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(123.438.585.034,00)	(132.503.778.610,00)
	Aktivitas Pembiayaan	569.621.732,01	228.695.000,00
	Aktivitas Non Anggaran	613.500.475,96	(10.431.219.710,00)

Sumber : Laporan Arus Kas Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2012-2014

Tabel 1.3 di atas menunjukkan perbandingan laporan arus kas Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2012-2014. Dapat dilihat dengan jelas bahwa arus kas dari aktivitas operasi baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami penurunan atau defisit yang dikarenakan arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk. Arus kas dari aktivitas pembiayaan pada Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi. Arus kas dari aktivitas non anggaran Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi sedangkan Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami penurunan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten Kupang maupun Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012-2014 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan opini berbeda. Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012-2013, BPK memberikan opini *Disclaimer* atau tidak memberi pendapat dan tahun 2014 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan terhadap LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 -2014 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dengan adanya kesamaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang digunakan namun opini yang diberikan oleh BPK berbeda, tentunya perlu dilakukan perbandingan atas LKPD Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2012-2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012-2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di uraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan pemerintah daerah antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam pemerintahan daerah sebagai wujud kepedulian akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah terutama untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai informasi serta masukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literatur kepustakaan, informasi, dan pengetahuan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.